



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SRAGEN

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Nomor : 000.5/381/22/2025

Nomor : 073/HK.02/K.JT-24/06/2025

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2025**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SRAGEN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SRAGEN

Nomor : 000.5/381/22/2025
Nomor : 073/HK.02/K.JT-24/06/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. I Yusep Wahyudi, M.Si

: Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Sragen, Jalan Raya Sukowati Barat No.15 D, Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I., MH

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen berkedudukan di Sragen, Jalan Teuku Umar No. 20, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu:

- a. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
- b. Penataan, pemeliharaan dan pengelolaan arsip;
- c. Pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip;
- d. Pembinaan sumber daya manusia;
- e. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan Perjanjian Kerja Sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan Perjanjian Kerja Sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui bimbingan teknis dan pelatihan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama bersama-sama.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada kebijakan pemerintah, ketentuan Hukum dan peraturan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- 2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



Drs. I Yusep Wahyudi, M.Si

PIHAK KEDUA



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I., MH